

**DAMPAK GANGGUAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA
PEGAWAI DI BPKPAD SUKOHARJO**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen

Oleh:

SUCI TRI ROCHMANI

22110170

PROGRAM STUDI MANAGEMENT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

TAHUN 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir

**DAMPAK GANGGUAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA
PEGAWAI BPKPAD SUKOHARJO**

Oleh:

Suci Tri Rochmani

22110170

Disetujui dan dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi S1 Manajemen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, Januari 2026

Dosen Pembimbing



Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.B.A

NUPTK. 5442770671230410

PENGESAHAN PENGUJI

Tugas Akhir

**DAMPAK GANGGUAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA
PEGAWAI BPKPAD SUKOHARJO**

Oleh:

Suci Tri Rochmani

22110170

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Tugas Akhir

Program Studi S1 Manajemen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, 30 Januari 2026

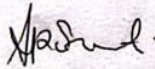
Dewan Penguji

Ari Susanti, S.Pt., M.M.

Ketua

Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.B.A.

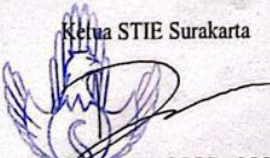
Anggota

: 

: 

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta


Aditya Lilivan, S.M.B., M.M.
NUPTK. 5438767668131040
Surakarta

Kepala Program Studi S1 Manajemen


Muhammad Srihabuddin, S.Hum.M.M.
NUPTK. 0256772673130313

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Tri Rochmani

NIM : 22110170

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

DAMPAK GANGGUAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI BPKPAD SUKOHARJO adalah betul-betul karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam Tugas Akhir ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Tugas Akhir ini.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Suci Tri Rochmani

MOTTO

"Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan"

(Nadin Amizah)

"Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak

MENANG"

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, pertolongan, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Sukino dan Ibu Darsini selaku orang tua tercinta, atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, kesabaran, serta dukungan moral dan materi yang senantiasa menguatkan langkah penulis.
3. Diri saya sendiri, Suci Tri Rochmani, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses, keterbatasan, serta tantangan selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah tetap kuat, konsisten, dan percaya pada diri sendiri hingga sampai di titik ini.
4. Terimakasih kepada Arduta Aji Vicko Putra Perdana, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Teman tercinta: Erlinda Rahma Agustina, yang telah menjadi teman seperjuangan, tempat berbagi cerita, saling menyemangati, serta memberikan dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman UKM Kesenian Artsties STIE Surakarta, yang telah menjadi ruang belajar, berkarya, dan bertumbuh, serta memberikan warna, kebersamaan, dan semangat dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan.
7. Bapak/Ibu dosen pembimbing, seluruh dosen, serta semua pihak yang telah memberikan ilmu, arahan, bantuan, dan motivasi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa setiap proses yang dijalani dengan kesungguhan, doa, dan dukungan orang-orang terdekat akan membuahkan hasil yang bermakna.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dampak Gangguan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Di BPKPAD Sukoharjo”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Manajemen STIE Surakarta.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan. Namun, berkat bimbingan, bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Sukino dan Ibu Darsini selaku orang tua tercinta, atas doa, kasih sayang, kesabaran, serta dukungan moral dan materi yang tiada henti.
3. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Selaku Ketua STIE Surakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di STIE Surakarta.
4. Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.B.A., Selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi S1 Manajemen STIE Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman UKM Kesenian Artsties STIE Surakarta, yang telah menjadi tempat belajar, berkarya, dan bertumbuh serta memberikan warna dalam perjalanan akademik penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Sukoharjo, Januari 2026

Penulis,

Suci Tri Rochmani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Kerangka Berpikir.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Objek penelitian.....	18
B. Jenis dan Sumber Data	18
C. Metode Pengumpulan Data	20
D. Uji Kredibilitas Data	21
E. Teknik Analisis Data.....	23

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	27
B. Pelaksanaan Penelitian	30
C. Analisis Data.....	34
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	39
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Tabel Profil Informan	31
Tabel 4.2 Triangulasi Sumber	35
Tabel 4.3 Triangulasi Teknik	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	17
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber.....	22
Gambar 3.2 Triangulasi Teknik.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Instansi BPKPAD Kabupaten Sukoharjo.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara Mendalam.....	51
Lampiran 2. Transkrip Wawancara Mendalam.....	55
Lampiran 3. Transkrip Wawancara Mendalam.....	58
Lampiran 4. Dokumentasi Bersama Narasumber/Informan	61
Lampiran 5. Dokumentasi Tempat Penelitian (BPKPAD Kabupaten Sukoharjo)	64

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak gangguan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap efektivitas kinerja pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo. SIPD sebagai sistem terintegrasi memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai gangguan teknis yang berpotensi menghambat kinerja aparatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-induktif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pegawai BPKPAD yang terlibat langsung dalam proses penginputan data, serta dokumentasi pendukung. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan SIPD, seperti bug sistem, error berulang, kesulitan akses, dan kegagalan penyimpanan data, berdampak signifikan terhadap efektivitas penginputan data. Gangguan tersebut menyebabkan keterlambatan pekerjaan, peningkatan beban kerja, serta menurunnya ketepatan dan akurasi laporan keuangan. Sebagai upaya mitigasi, BPKPAD Kabupaten Sukoharjo menerapkan solusi alternatif berupa penginputan data menggunakan Microsoft Excel serta mekanisme pelaporan gangguan kepada tim audit internal dan pihak pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stabilitas dan keandalan SIPD sangat menentukan efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: SIPD, efektivitas kinerja pegawai, BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of disruptions in the Regional Government Information System (SIPD) on the effectiveness of employee performance at the Regional Finance, Revenue, and Asset Management Agency (BPKPAD) of Sukoharjo Regency. As an integrated system, SIPD plays a strategic role in supporting transparent and accountable regional financial management. However, in practice, this system still faces various technical disruptions that have the potential to hinder apparatus performance. This study used a qualitative approach with a descriptive-inductive method. Data were obtained through observation, in-depth interviews with BPKPAD employees directly involved in the data input process, and supporting documentation. Data validity was tested using source and technical triangulation techniques. The results indicate that SIPD disruptions, such as system bugs, recurring errors, access difficulties, and data storage failures, significantly impacted the effectiveness of data input. These disruptions caused delays, increased workloads, and decreased accuracy and precision of financial reports. As a mitigation measure, BPKPAD of Sukoharjo Regency implemented an alternative solution in the form of data input using Microsoft Excel and a mechanism for reporting disruptions to the internal audit team and the central government. This study concludes that the stability and reliability of the SIPD significantly determine the effectiveness of regional financial management performance.

Keywords: SIPD, employee performance effectiveness, BPKPAD Sukoharjo Regency

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan negara. Oleh karena itu, dengan mengacu pada pengertian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah dapat diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan satuan uang, serta segala bentuk kekayaan daerah, baik berupa uang maupun barang, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah mengelola keuangan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan dengan melibatkan banyak lembaga seperti Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah (SETDA), DPRD dan BPK RI. Badan keuangan skala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan secara menyeluruh termasuk perencanaan dan penganggaran daerah (APBD), pengelolaan pendapatan dan belanja, penatausahaan kas dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset atau barang milik daerah (BMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga kategori utama, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD meliputi pajak daerah (seperti parkir, pasar, dan pelayanan kesehatan), hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya.

Daerah menerima transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Sumber lainnya mencakup Hibah dan Bantuan Keuangan yang legal. Pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai berbagai jenis belanja, antara lain belanja operasional seperti gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan. Selain itu, digunakan untuk belanja modal yang mencakup pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset, serta belanja transfer untuk bantuan ke desa, hibah sosial, dan pendidikan. Ada juga belanja tidak terduga yang digunakan saat terjadi bencana atau keadaan darurat. Keseluruhan proses ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Salah satu OPD yang menangani keuangan daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Instansi ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah, serta pengelolaan pendapatan dan aset milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Keberadaan BPKPAD di daerah sangat penting dan strategis, karena badan ini menjadi tulang punggung dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terencana, transparan, akuntabel, dan efisien.

Keberadaan BPKPAD memberikan dampak positif bagi daerah seperti meningkatnya pendapatan daerah karena pajak dan retribusi tertata rapi, laporan keuangan mendapat opini WTP dari BPK setiap tahun, aset daerah seperti tanah, bangunan, dan kendaraan bisa dioptimalkan untuk pelayanan publik serta dana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur bisa dicairkan tepat waktu.

BPKPAD wajib ada di setiap daerah karena menjadi pusat manajemen keuangan daerah. Tanpa BPKPAD, perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak bisa berjalan tertib, dan transparansi keuangan pemerintah daerah akan terganggu. Secara umum, tugas dan fungsi BPKPAD meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengelolaan kas daerah dan pelaksanaan penatausahaan keuangan, Pengelolaan Dana Transfer ke desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Pengelolaan aset tetap dan inventarisasi barang milik daerah, pelaporan keuangan daerah secara berkala dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah, badan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo memanfaatkan sejumlah aplikasi dan sistem informasi berbasis digital. Sistem-sistem ini digunakan secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa sistem utama yang digunakan antara lain Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan menjadi sistem utama untuk perencanaan pembangunan daerah (RKPD, Renja), penganggaran (RKA, APBD, DPA), Penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan dan kinerja. SIPD bersifat wajib dan digunakan secara nasional oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk BPKPAD Sukoharjo. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan sistem yang dikembangkan oleh BPKP (Badan pengawasan keuangan dan pembangunan), SIMDA sebelumnya digunakan untuk pengelolaan keuangan, aset dan perencanaan sebelum adanya SIPD. Di beberapa daerah, termasuk sukoharjo, sistem ini masih digunakan secara terbatas untuk pembukuan keuangan daerah, inventarisasi aset, arsip data keuangan sebelum transisi penuh ke SIPD. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIP-BMD) sistem ini digunakan untuk pengelolaan aset daerah, mulai dari pencatatan, pelaporan, hingga penilaian aset tetap dan non-tetap milik Pemkab Sukoharjo. Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIPAD) digunakan untuk memantau dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah dan retribusi.

Sistem ini membantu dalam optimalisasi penerimaan daerah melalui pelaporan dan monitoring realisasi pendapatan secara elektronik.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan di lingkungan pemerintah daerah. SIPD menjadi sistem utama dalam tata kelola keuangan daerah secara digital, dan penggunaannya diwajibkan di seluruh kabupaten/kota. Dalam Permendagri Nomor 70 tahun 2019, dijelaskan bahwa SIPD merupakan, pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya yang berhubungan guna digunakan pada pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan peraturan ini, seluruh satuan kerja perangkat daerah (berikutnya disingkat SKPD) diminta untuk menerapkan aturan baru tersebut.

Di Kabupaten Sukoharjo, SIPD dioperasikan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Salah satu tugas penting BPKPAD adalah menginput data terkait Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan (BK), serta penyusunan dokumen anggaran daerah seperti APBD dan DPA ke dalam sistem SIPD.

Namun dalam pelaksanaannya, SIPD sering mengalami gangguan atau bug sistem. Masalah teknis yang kerap muncul meliputi lambatnya akses sistem, kegagalan penyimpanan data, hilangnya data yang telah diinput, serta error yang

muncul tanpa kejelasan penyebabnya. Gangguan ini menjadi hambatan serius dalam proses input data, terutama ketika dilakukan secara massal, seperti pada input data 150 desa dari 11 kecamatan dalam satu tahap oleh BPKPAD Sukoharjo. (BPKPAD Kab.Sukoharjo, 2025)

Akibat dari gangguan tersebut, efektivitas kerja para operator menurun. Proses penginputan menjadi lebih lambat, tidak efisien, dan rawan kesalahan. Selain itu, beban kerja meningkat karena adanya keharusan menginput ulang data yang hilang atau gagal tersimpan. Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan, serta berpotensi mengganggu koordinasi antar OPD dan pemerintah desa. Dalam perspektif manajemen strategis, proses perencanaan dan penganggaran daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari fungsi manajerial. Oleh karena itu, gangguan pada sistem pendukung seperti SIPD dapat berpengaruh langsung terhadap efektivitas proses input data yang menjadi dasar dari perencanaan dan penganggaran (Yuwono, 2008)

Mengingat pentingnya peran SIPD dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis lebih dalam dampak gangguan sistem SIPD terhadap efektivitas kinerja pegawai, khususnya di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo. Beberapa bentuk bug atau gangguan yang sering terjadi di BPKPAD antara lain, Lambatnya respon sistem (loading lama) saat input data desa atau anggaran kegiatan, gagal simpan data, meskipun semua kolom telah diisi dengan benar, data yang telah diinput tiba-tiba hilang atau

tidak terbaca oleh sistem, sistem tidak dapat diakses pada jam-jam tertentu (sering terjadi saat input massal).

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk meneliti berbagai kendala yang terjadi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), khususnya terkait gangguan sistem yang mempengaruhi efektivitas kinerja karyawan di BPKPAD Sukoharjo. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Dampak Gangguan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai di BPKPAD Sukoharjo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk gangguan teknis (bug/error) yang sering terjadi dalam penggunaan sistem SIPD di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana dampak gangguan sistem SIPD terhadap efektivitas kinerja pegawai?
3. Upaya apa saja yang telah atau dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan sistem SIPD agar proses kerja tetap berjalan optimal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi jenis-jenis gangguan teknis (bug/error) yang sering terjadi dalam penggunaan sistem SIPD di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo.
2. Menganalisis dampak dari gangguan sistem SIPD terhadap efektivitas kinerja pegawai.

3. Menyusun rekomendasi atau solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi gangguan sistem SIPD, guna mendukung kelancaran dan akurasi proses kerja di lingkungan BPKPAD.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan teknis yang dihadapi oleh BPKPAD Kabupaten Sukoharjo dalam penggunaan sistem SIPD.
- b. Menjadi dasar bagi BPKPAD untuk menyusun strategi perbaikan dan peningkatan efektivitas kerja, khususnya dalam penginputan data anggaran dan dokumen perencanaan.
- c. Menyediakan rekomendasi solusi teknis yang dapat diterapkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi dampak gangguan sistem.

2. Manfaat Akademis

- a. Menambah referensi dan literatur mengenai implementasi sistem informasi pemerintahan daerah, khususnya terkait kendala teknis dalam penerapannya.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah bagi peneliti atau mahasiswa yang tertarik dalam kajian sistem informasi pemerintahan, manajemen keuangan daerah, dan e-governance.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Sistem Informasi

(Sholeh & Wahyudin, 2021), sistem informasi manajemen merupakan sarana komunikasi yang mencakup proses memasukkan, mencatat, menyimpan, dan mengambil data untuk mendukung fungsi perencanaan, pelaksanaan operasional, serta pengawasan. Dalam kaitannya dengan penggunaan Sistem yang digunakan pemerintah untuk mempermudah penginputan data pada instansi keuangan daerah, gangguan terhadap sistem ini dapat menghambat alur proses tersebut, sehingga berdampak langsung pada efektivitas penginputan data oleh staf. Ketika sistem tidak berjalan optimal, proses input menjadi terhambat, yang pada akhirnya mengganggu akurasi, ketepatan waktu, dan kelancaran dalam pelaporan data keuangan daerah.

(Reza Nurul Ichsan, 2020), sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang terorganisir dan saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Sistem ini berperan penting dalam mendukung pengelolaan data keuangan secara terstruktur. Apabila terjadi gangguan pada sistem, maka integrasi antar bagian tidak berjalan optimal, sehingga dapat menurunkan efektivitas penginputan data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

(Hakim L, 2019), sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis teknologi maupun manusia yang dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam mendukung aktivitas manajerial dan proses pengambilan keputusan. Sistem ini menjadi alat penting dalam menunjang kegiatan penginputan data keuangan. Gangguan pada sistem akan menghambat tersedianya informasi secara akurat dan tepat waktu, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas kerja staf serta kelancaran fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah.

(Qomah et al., 2021), Teknologi informasi merupakan sarana yang dimanfaatkan untuk mengelola data, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, pengorganisasian, penyimpanan, hingga pemanfaatan data dalam berbagai bentuk, sehingga mampu menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan bersifat relevan, akurat, dan tepat waktu guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, termasuk dalam proses penginputan data keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Berdasarkan keempat pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem terstruktur yang terdiri dari komponen-komponen teknologi maupun manusia yang bekerja sama untuk mengelola, memproses, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung fungsi manajemen, operasional, serta pengambilan keputusan. Dalam konteks instansi pemerintahan penggunaan sistem menjadi bagian penting dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk

menunjang efektivitas kinerja pegawai. Gangguan dalam sistem seperti keterlambatan akses, error, atau tidak terhubung data, akan berdampak langsung pada terganggunya aliran informasi, penurunan kinerja staf, serta berkurangnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan pengambilan keputusan keuangan daerah.

2. Laporan Keuangan

Menurut (Hanaffi, 2017), laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh pihak yang menyusun laporan tersebut. Dalam konteks instansi pemerintahan daerah, penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui proses akuntansi yang mengikuti siklus tertentu, mulai dari identifikasi dokumen, pencatatan dalam jurnal, hingga penyesuaian berdasarkan periode akuntansi masing-masing akun. Ketika sistem pendukung mengalami gangguan, maka proses input data yang menjadi dasar dari penyusunan laporan keuangan akan terganggu pula, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan, kelengkapan, dan akurasi laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas manajemen dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi indikator penting dalam memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu entitas, baik dalam konteks masa lalu, saat ini, maupun proyeksi ke depan. Dalam pengelolaan

keuangan daerah melalui sistem yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, efektivitas input data menjadi hal krusial karena mempengaruhi ketepatan dan keandalan laporan keuangan. Apabila terjadi gangguan pada sistem tersebut, maka proses penyusunan laporan keuangan dapat terhambat, sehingga berdampak pada akurasi informasi serta penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

(Rochman, R., & Pawenary, 2020), laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi terkait kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Informasi ini dirancang agar dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak pengguna dalam pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sangat bergantung pada efektivitas proses input data melalui sistem yang digunakan pemerintah daerah. Ketika sistem mengalami gangguan, kualitas informasi yang dihasilkan pun dapat terganggu, sehingga berdampak pada ketepatan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan instrumen utama pertanggungjawaban manajemen dalam menggambarkan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini tidak hanya mencerminkan hasil pengelolaan sumber daya, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh berbagai pihak. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas penyusunan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kelancaran proses input data, yang dilakukan melalui sistem informasi. Ketika sistem informasi mengalami gangguan baik dalam bentuk

keterlambatan sistem, error saat input, atau kegagalan sinkronisasi data maka hal ini dapat menghambat ketepatan, kelengkapan, dan akurasi laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Akibatnya, proses pertanggungjawaban, transparansi keuangan, dan pengambilan kebijakan juga dapat ikut terdampak secara signifikan.

3. Kinerja Karyawan

(Ridwan et al., 2020), kinerja merupakan pencapaian atau tingkat keberhasilan individu secara menyeluruh dalam menjalankan tugas selama periode tertentu, yang diukur berdasarkan standar, target, atau kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Efektivitas penginputan data oleh staf merupakan bagian dari indikator kinerja, di mana gangguan pada sistem dapat menghambat pencapaian target kerja, menurunkan produktivitas, serta mempengaruhi ketepatan waktu dan kualitas hasil kerja yang seharusnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

(Ngo et al., 2019), kinerja karyawan dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu dalam suatu pekerjaan tertentu, yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti ketepatan waktu, kecepatan penyelesaian tugas, dan efisiensi kerja. Efektivitas penginputan data ke dalam sistem menjadi bagian penting dari kinerja yang dimaksud. Ketika sistem mengalami gangguan, hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap waktu dan efisiensi kerja staf, sehingga menghambat pencapaian kinerja yang optimal sesuai tanggung jawab yang dibebankan.

(Paais, M., & Pattiruhu, 2020), kinerja merujuk pada perilaku atau tindakan nyata yang dapat diamati dari seorang pegawai dalam upaya menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Efektivitas penginputan data ke dalam sistem mencerminkan kinerja staf secara langsung. Ketika sistem mengalami gangguan, proses kerja menjadi terhambat dan berdampak pada ketidaktercapaian tugas yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai target, sehingga menurunkan kinerja yang terlihat dari aktivitas kerja harian pegawai.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil nyata dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu yang dinilai berdasarkan waktu, efisiensi, kecepatan, dan pencapaian target kerja. Kinerja mencerminkan seberapa baik seorang pegawai mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan dan dapat diamati dari perilaku kerjanya. Efektivitas penginputan data menjadi indikator penting dari kinerja staf. Ketika terjadi gangguan sistem, maka pencapaian kinerja tersebut dapat terganggu, karena proses input menjadi terhambat, tidak efisien, atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kualitas kerja pegawai.

B. Penelitian Terdahulu

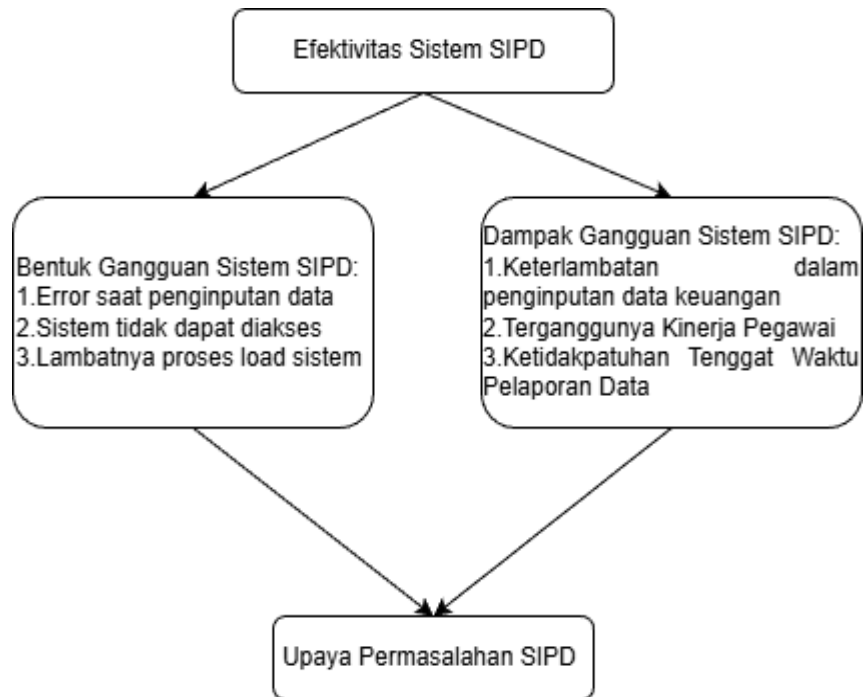
Berikut ini kajian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1	(Nanda Dias Ekaputra, 2021)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk	Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun pertama penerapannya. Yang menjadi hambatan dari efektivitas penggunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD.
2	(Iribaram, 2021)	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika	Hasil temuan mengenai tingkat efektivitas sistem informasi pemerintah daerah sebagai penunjang kinerja keuangan Kabupaten Mimika dianalisis melalui dimensi pada teori efektivitas menurut Duncan, pada dimensi pencapaian tujuan diketahui tujuan utama penerapan sistem informasi ini belum sepenuhnya berhasil hal ini terlihat dari belum bisa menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara keseluruhan, pada dimensi integrasi terlihat sudah ada aktivitas yang menunjukkan keterkaitan antar dinas, pada dimensi adaptasi terlihat masih mengalami kendala hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya penggunaan Sistem Informasi Daerah sebagai penunjang kinerja Keuangan Daerah.

3	(Fardiansah & Lestari, 2025)	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan Keuangan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sudah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat hambatan yang ditemui dalam indikator monitoring, kesesuaian program dan prosedur berupa keterbatasan fitur dalam sistem, pemahaman teknis sumber daya manusia yang belum optimal, dan lambatnya akses sistem.
---	------------------------------	---	--

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai "Dampak Gangguan Sistem SIPD Terhadap Efektivitas Penginputan Data di Instansi BPKPAD Kabupaten Sukoharjo" maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi berbagai gangguan teknis, terutama berupa bug sistem, error berulang, kesalahan penyimpanan dokumen, dan kesulitan akses aplikasi. Gangguan ini sering menyebabkan sistem tiba-tiba keluar (force close), gagal menyimpan data, tidak merespon perintah, atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Kendala tersebut diperparah oleh waktu loading yang lama, terutama saat terjadi penginputan massal menjelang batas waktu pelaporan. Akibatnya, proses kerja pegawai terhambat dan menurunkan ketepatan serta keandalan data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan daerah.
- b. Gangguan SIPD berdampak signifikan terhadap efektivitas kinerja pegawai di BPKPAD Sukoharjo. Bug dan error pada sistem menyebabkan pekerjaan pegawai tertunda, tidak selesai sesuai jadwal, dan mengharuskan pegawai mengulang proses input karena data sering gagal tersimpan. Akibatnya, beban kerja meningkat karena pegawai harus melakukan penginputan manual menggunakan excel sebagai alternatif sementara. Selain itu, kualitas laporan keuangan menjadi menurun karena gangguan SIPD menghambat

ketepatan waktu, akurasi data, kelengkapan informasi, dan proses verifikasi, sehingga tidak memenuhi standar karakteristik laporan keuangan yang baik. Hal ini berdampak langsung pada kinerja pegawai, karena keterlambatan dan ketidakakuratan dalam proses input menceminkan turunnya efektivitas pelaksanaan tugas.

- c. Untuk mengatasi gangguan sistem, BPKPAD Kabupaten Sukoharjo menerapkan langkah alternatif berupa penggunaan Microsoft Excel selama SIPD tidak dapat diakses. Upaya ini memungkinkan pekerjaan tetap berjalan dan data tetap dapat disiapkan, meskipun harus dilakukan penginputan ulang setelah sistem kembali normal. Pegawai juga melakukan pengecekan ulang data di SIPD jika terdapat kesalahan penempatan file maka pegawai harus memindahkan data ke tempat yang semestinya. Selain itu, BPKPAD juga memiliki tim audit internal yang bertugas menerima laporan gangguan, melakukan verifikasi, dan meneruskannya kepada pihak pusat untuk perbaikan lebih lanjut. Langkah ini memastikan bahwa kendala teknis tidak hanya ditangani secara sementara, tetapi juga dibenahi dari sisi pengembangan sistem. Secara keseluruhan, kombinasi antara penggunaan solusi alternatif dan mekanisme pelaporan formal menunjukkan komitmen instansi dalam menjaga kelancaran pekerjaan meskipun SIPD belum sepenuhnya stabil.

B. Saran

Dalam sebuah penelitian harus mampu memberikan sesuatu yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau lembaga, komunitas serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti mengemukakan saran-saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan skripsi ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk instansi BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak pusat pengelola SIPD agar setiap gangguan teknis seperti bug, error, dan kesalahan penyimpanan dokumen dapat segera ditindaklanjuti.
- b. Mengingat gangguan SIPD sebagian disebabkan oleh kapasitas penyimpanan yang tidak sebanding dengan volume data, BPKPAD dapat mengusulkan peningkatan server, kapasitas penyimpanan dan optimalisasi fitur SIPD kepada pemerintah pusat
- c. Memperkuat sistem backup data untuk mencegah kehilangan data untuk menghindari risiko hilangnya data akibat error sistem, disarankan adanya pembaruan rutin terhadap mekanisme backup data internal sehingga seluruh data tetap aman meskipun SIPD mengalami kendala

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai bidang, seperti perencanaan, anggaran dan aset sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait penggunaan SIPD
- b. Fokus penelitian selanjutnya dapat diperluas pada bagaimana gangguan SIPD berpengaruh terhadap pelayanan publik secara keseluruhan tidak hanya pada proses penginputan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 146–150.
- Fardiansah, A., & Lestari, E. B. (2025). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (Sipd Ri) Dalam Pengelolaan Keuangan Di* 1–13.
[http://eprints.ipdn.ac.id/20631/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/20631/1/32.0247_Arifin Fardiansah.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/20631/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/20631/1/32.0247_Arifin%20Fardiansah.pdf)
- Fauzi, G. R. (2019). *Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Hakim L. (2019). *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Informasi Manajemen Dilengkapi Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*.
- Hanaffi. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati). *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 1(1), 121.
- Iribaram, S. H. N. (2021). *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI PENUNJANG KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MIMIKA*. 167–186.
- Nanda Dias Ekaputra. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk*. 21(April), 62–79.
- Ngo, L. V., Nguyen, N. P., Huynh, K. T., Gregory, G., & Cuong, P. H. (2019). Converting internal brand knowledge into employee performance. *Journal of Product & Brand Management*, 29(3), 273–287.
<https://doi.org/10.1108/JPBM-10-2018-2068>
- Paais, M., & Pattiruhu, J. R. (2020). Effect of motivation, leadership, and organizational culture on satisfaction and employee performance. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(8), 577–588.
- Qomah, S., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2021). *Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah*. 0832, 95–108.
- Reza Nurul Ichsan. (2020). *PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN*. 2, 128–136.
- Ridwan, M., Mulyani, S. R., & Ali, H. (2020). *Improving Employee Performance Through Perceived Organizational Support , Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior*. 11(12), 839–849.
- Rochman, R., & Pawenary, P. (2020). Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai

- Kinerja Keuangan Pt Harum Energy Periode 2014-2019. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 171-184.
- Sholeh, M., & Wahyudin, D. (2021). *Pengaruh sistem informasi manajemen dan kompetensi terhadap efektifitas kerja di pt citra solusi informatika*. 3(1), 28–41.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Alfabeta, Bandung*.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta*. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=20670>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan. *Alfabeta, Bandung*.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Ke-2). In *Alfabeta*.
- Yuwono, S. dkk. (2008). Memahami APBD dan Permasalahannya Pengelolaan Keuangan (Panduan Daerah). *Malang: Bayumedia*.